



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH



LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS

TAHUN 2024

Alamat : Jl. KH Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar, Kode Pos 57713

Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366

Website : www.bkd.karanganyarkab.go.id

E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Assallamu’alaikum Wr. Wb.



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, dan karuniaNya, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menyusun da menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) ini berisikan gambaran pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam satu (1) tahun anggaran. Penyusunan LPT adalah penyampaian harapan yang akan dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan LPT sebagai laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD/OPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 ini, semoga buku laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Badan Keuangan Daerah dan kami sampaikan terima kasih yang tulus semoga Allah SWT menerima amal kebbaikannya dan memberikan rahmat-Nya. Amin.

Wassallamu’alaikum Wr.Wb

Karanganyar, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700510 199003 1 006

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Dasar Hukum..... 1

 C. Maksud dan Tujuan 2

BAB II : DISKRIPSI SKPD/OPD 3

 A. Tugas dan Fungsi 3

 B. Standard Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD..... 3

 C. Perda/Perbub Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
 Program Kegiatan 5

 D. Struktur Organisasi 7

 E. Kepegawaian 9

BAB III : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH 13

 A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 13

 B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 13

 C. Urusan Pilihan 13

 D. Urusan Pemerintah fungsi Penunjang 13

BAB IV : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 16

 A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16

 B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar 21

 C. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
 Pelayanan Dasar 21

 D. Urusan Pemerintahan Pilihan 21

 E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 21

 F. Unsur Pennunjang Urusan Pemerintahan 21

 G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... 32

 H. Unsur Kewilayahan 32

 I. Unsur Pemerintahan Umum 32

 J. Unsur Kekhususan 32

BAB V : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN 33

A. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten..... 33

B. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten..... 33

C. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepala Desa 33

BAB VI : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 34

A. Target dan Indikator Pencapaian SPM 34

B. Indek Pencapaian (IP) SP..... 34

BAB VII : INOVASI DAN PENGHARGAAN 35

A. Inovasi 35

B. Penghargaan 35

BAB VIII : PENUTUP 36

A. Kesimpulan 36

B. Saran 36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan, maka sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Karanganyar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berkewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2024.

Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah yang sekaligus untuk di informasikan kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari tentang penyelenggaraan pemerintahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026;
10. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di bidang Keuangan Daerah dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dengan segala permasalahan serta langkah langkah penyelesaiannya.

Tujuan Penyusunan LPT merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024. LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
DESKRIPSI BADAN KEUANGAN DAERAH

A. Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :

- 1. Tugas
Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- 2. Fungsi
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Standard operating Procedure (SOP) OPD

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah menyusun Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan tugas tugas untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain :

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP	TANGGAL SOP
1	Pelayanan Pajak Penerangan Jalan	900/1.279/SOP/II/2023	2 Januari 2023
2	Naskah Dinas Masuk	900/1.307/SOP/II/2023	2 Januari 2023
3	Naskah Dinas Keluar	900/1.285/SOP/II/2023	2 Januari 2023
4	Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah	900/1.280/SOP/II/2023	2 Januari 2023
5	Pelayanan Pajak Hotel	900/1.289/SOP/II/2023	2 Januari 2023
6	Pelayanan Pajak Restoran	900/1.290/SOP/II/2023	2 Januari 2023
7	Pelayanan Pajak Hiburan	900/1.291/SOP/II/2023	2 Januari 2023

8	Pelayanan Pajak Reklame	900/1.292/SOP/II/2023	2 Januari 2023
9	Pelayanan Pajak Air Tanah	900/1.293/SOP/II/2023	2 Januari 2023
10	Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900/1.294/SOP/II/2023	2 Januari 2023
11	Pelayanan Pajak Parkir	900/1.288/SOP/II/2023	2 Januari 2023
12	Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	900/1.287/SOP/II/2023	2 Januari 2023
13	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	900/1.286/SOP/II/2023	2 Januari 2023
14	Penagihan Pajak	900/1.295/SOP/II/2023	2 Januari 2023
15	Keberatan dan Banding	900/1.296/SOP/II/2023	2 Januari 2023
16	Pemeriksaan Atas Kelebihan Pembayaran PBB/Pajak-Pajak Daerah lainnya	900/1.297/SOP/II/2023	2 Januari 2023
17	Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	900/1.298/SOP/II/2023	2 Januari 2023
18	Penyusunan KUA Ppas dan APBD	900/1.283/SOP/II/2023	2 Januari 2023
19	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Belanja Pajak, Piutang serta Pendapatan	900/1.282/SOP/II/2023	2 Januari 2023
20	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan ke Depan	900/1.299/SOP/II/2023	2 Januari 2023
21	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LK-OPD)	900/1.300/SOP/II/2023	2 Januari 2023
22	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	900/1.301/SOP/II/2023	2 Januari 2023
23	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	900/1.281/SOP/II/2023	2 Januari 2023
24	Pelayanan Peminjaman BPKB	900/1.302/SOP/II/2023	2 Januari 2023
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah	900/1.303/SOP/II/2023	2 Januari 2023
26	Penjualan barang Milik Daerah	900/1.305/SOP/II/2023	2 Januari 2023
27	Penghapusan Karena Penjualan Atas BMD	900/1.304/SOP/II/2023	2 Januari 2023
28	Pengaduan Layanan Masyarakat	900/43.10/III/2023	5 Maret 2024
29	Permohonan Informasi Publik	900/46.33/III/2023	6 Maret 2024
30	Pengajuan Keberatan Informasi Publik	900/46.32/III/2023	6 Maret 2024

C. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Kegiatan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program kegiatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati

Karanganyar antara lain :

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Restoran;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Parkir;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak tentang Pajak Hiburan;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Penerangan Jalan;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Air Tanah;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah.

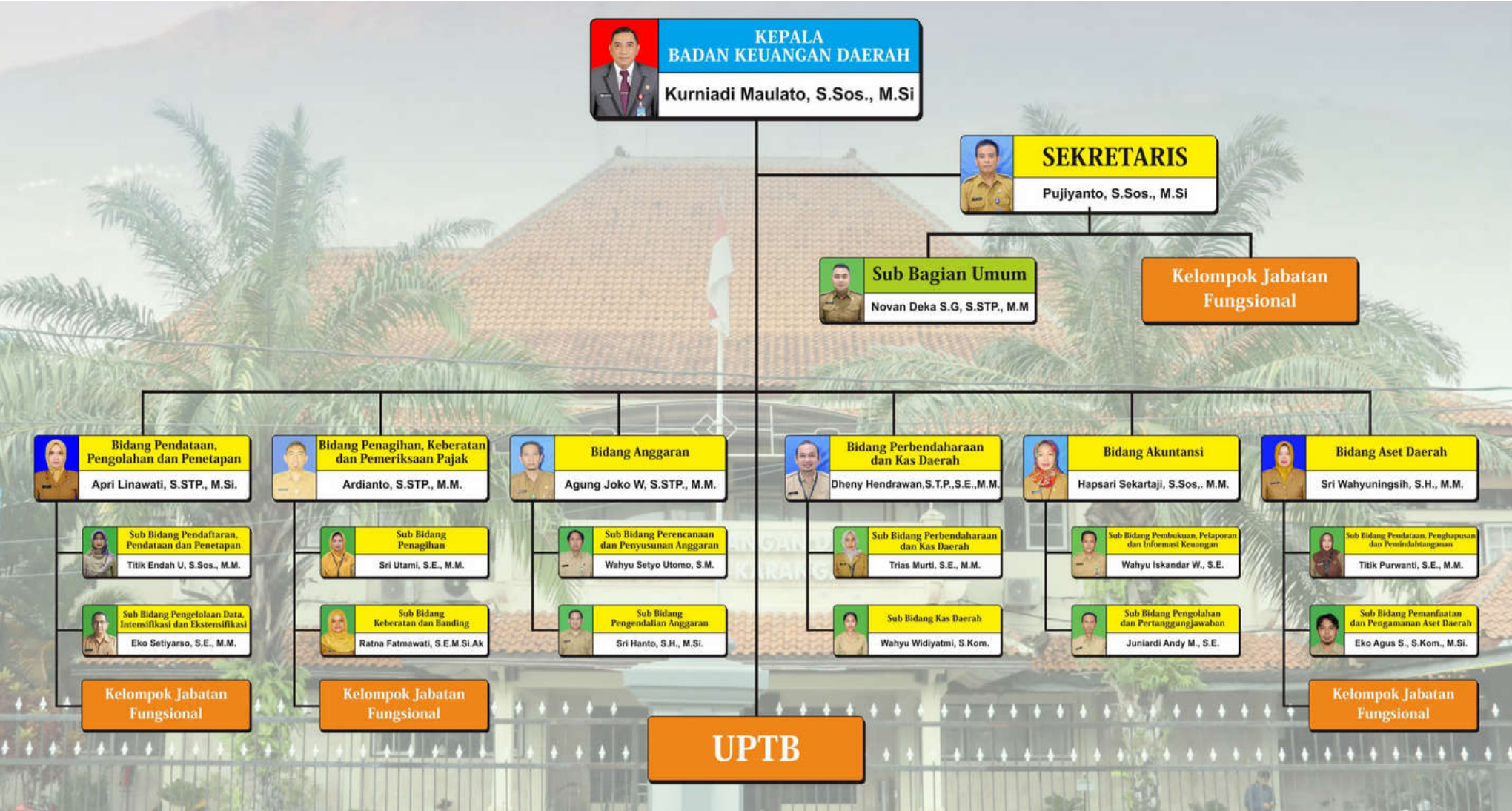
D. Struktur Organisasi

Sesuai Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan, Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pendataan, Pengolahan dan penetapan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bidang Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.
8. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



E. **Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 67 Pegawai, meliputi:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/PPPK)	PANGKAT / GOLONGAN
1	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.	197005101990031006	Kepala Badan Keuangan Daerah	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	PUJIYANTO, S.Sos, M.Si.	197105151990031002	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	PNS	Pembina Tk.I (IV/b)
3	APRI LINAWATI, S.S.T.P., M.Si.	198204172001122003	Kabid. Pendataan, Pengolahan Dan Penetapan	PNS	Pembina (IV/a)
4	HAPSARI SEKARTAJI, S.Sos., M.M.	198105092005012011	Kabid. Akuntansi	PNS	Pembina (IV/a)
5	SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.	197405142005012008	Kabid. Aset Daerah	PNS	Pembina (IV/a)
6	DHENY HENDRAWAN, S.T.P., S.E., M.M.	198001052005011008	Kabid. Perbendaharaan dan Kas	PNS	Pembina (IV/a)
7	AGUNG JOKO WIYARSO, S.S.T.P., M.M.	197808191997111001	Kabid. Anggaran	PNS	Pembina (IV/a)
8	ARDIANTO, S.S.T.P., M.M.	198208212001121002	Kabid. Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak	PNS	Pembina (IV/a)
9	NOVAN DEKA SETYA GARAGUNA, S.S.T.P., M.M	199011132015071001	Kasubbag Umum	PNS	Penata (III/c)
10	EKO SETIYARSO, S.E., M.M.	197002081991031004	Kasubbid. Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi	PNS	Pembina (IV/a)
11	TITIK ENDAH UTARI, S.Sos., M.M	197804121997032003	Kasubbid. Pendaftaran dan Pendataan	PNS	Penata Tk.I (III/d)
12	SRI SUTAMI, S.E., M.M.	196710101991022001	Kasubbid. Penagihan	PNS	Pembina (IV/a)
13	RATNA FATMAWATI, S.E, M.Si, Ak	197910152008042002	Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Banding	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
14	SRI HANTO, S.H., M.Si.	197804201997031002	Kasubbid. Pengendalian Anggaran	PNS	Pembina (IV/a)
15	WAHYU SETYO UTOMO, S.M.	197411031998031003	Kasubid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	PNS	Penata Tk.I (III/d)
16	TRIAS MURTI, S.E., M.M.	197608212003122006	Kasubbid. Perbendaharaan	PNS	Pembina (IV/a)
17	WAHYU WIDIYATMI, S.Kom.	197309141994012001	Kasubbid. Kas Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)

18	WAHYU ISKANDAR WIDYOBROTO, S.E.	197307252006041008	Kasubbid. Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan	PNS	Penata Tk.I (III/d)
19	JUNIARDI ANDY MARWINDIO, S.E.	197606212005011010	Kasubbid. Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan	PNS	Penata Tk.I (III/d)
20	EKO AGUS SANTOSO, S.Kom., M.Si.	197708032005011008	Kasubbid. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	PNS	Penata (III/c)
21	TITIK PURWATI, S.E., M.M.	197808081998032006	Kasubbid. Pendataan Aset Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
22	TRI SURYANINGSIH, S.E., M.M.	197810232010012012	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
23	KUSUMASTUTI INDRIAMAYA, A.Md.	198403292006042008	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata (III/c)
24	TRI WAHYUNI, S.Kom.	198810052011012009	Analisis dan Informasi Pada Sub Bagian Perencanaan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata (III/c)
25	RETNOWATI, A.Md.	198203182010012025	Pengelola Kepegawaian Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
26	DWI PURWANTI, S.E.	197605251997032003	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
27	WULAN FITRIANA SARI, S.E	198705172011012016	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda (III/a)
28	DYAH BUDI HAPSARI	196711262007012020	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
29	SUMIDI	197403212010011003	Pramu Kebersihan Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
30	MARDIMAN	196902092010011002	Pelaksana Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Juru (I/c)
31	AGUNG NEHRUADI	197311061998031005	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
32	DWIE HARY ANTONO	197510272010011001	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
33	ANDU AGUNG PURWANDONO, S.E., M.M.	198005182003121006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PNS	Pembina (IV/a)
34	MUJIYONO, S.P.	196608021999031003	Analisis Pendapatan Daerah Pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
35	SLAMET, S.E.	196605011995031001	Analisis Pendapatan Daerah Pada Sub Bidang Penetapan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
36	GALUH KURNIAWAN, S.E., M.M	198410232010011021	Analisis pendapatan daerah Pada Subbid Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
37	WALUYA, S.E, M.M	197605122011011005	Analisis pendapatan daerah Pada Subbid Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
38	ANDHI SARWOKO, S.E	198803012011011007	Analisis pendapatan daerah Pada Subbid Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)

39	HERDIYANA CATUR N., S.E	198805022011012024	Analisis Pendapatan Daerah Pada Subbid Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
40	YUSUB MARDIYANTO	197606092010011003	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah Pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
41	SRIYANI	197709162010012002	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah Pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
42	PUTIAWAN	197910032010011002	Pengelola pendapatan Pada Subbid Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
43	ENY DWI SULISTIANINGSIH, S.E.	197808152003122013	Pengelola Penagihan dan Pengawasan Pada Sub Bidang Penagihan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
44	RIRIN IKASARI, S.E., M.M	198607242010012038	Pengevaluasi Uji Banding Pada Sub Bidang Keberatan dan Banding Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	PNS	Penata (III/c)
45	TRI HARTANTO, S. Ak.	19830527201001002	Pengevaluasi Uji Banding Pada Sub Bidang Keberatan dan Banding Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	PNS	Pengatur Tk. I (II/d)
46	HERY SETIAWAN, S.Pd. M.I.Kom	197905112010011020	Pengelola Penagihan dan Pengawasan Pada Sub Bidang Penagihan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tingkat (III/d)
47	SUWONO	196912042007011015	Pengelola Penagihan dan Pengawasan Pada Sub Bidang Penagihan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur (II/c)
48	DIEMAS PERDANA KUSUMA, S.H	198311082011011006	Pengevaluasi Uji Banding Pada Sub Bidang Keberatan dan Banding Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	PNS	Penata Tk.I (III/d)
49	NURIYATI, A.Md.	198410192011012013	Pengevaluasi Uji Banding Pada Sub Bidang Keberatan dan Banding Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
50	CLOUDIA DEWANTIN, S.I.P., M.M.	197110181996032004	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pada Sub Bidang Pengendalian Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pembina (IV/a)
51	YOGA PRADITYA, S.E., M.M	198811282011011003	Verifikator Anggaran Pada Sub Bidang Pengendalian Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
52	ADIK ENDIRA NARISWARI, S.E., M.M.	197402021996062001	Analisis Perbendaharaan Pada Sub Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pembina (IV/a)
53	SARI DEWI PRASETYANINGRUM, S.E.	198001202006042002	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan Pada Sub Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
54	HARTONO	197905132008011025	Pengelola Data Pencairan Dana Pada Sub Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)
55	JOKO HADIYANTO, A.Md.	198006072009021005	Pengelola Data Pencairan dana Pada Sub Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
56	RACHMAT YUWONO NUGROHO, S.E	198005242009031003	Pengelolaan Perbendaharaan dan Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
57	SITI LESTARI, S.Sos., M.M	197111161997032002	Analisis Perbendaharaan Pada Sub Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pembina (IV/a)
58	WINARKRIS AGUSTINI	196608181989122002	Pranata Laporan Keuangan Pada Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)

59	ETITIA SULARNO, S.E.	198504282009022006	Pengelola Akuntansi Pada Sub Bidang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
60	APRILIA RAHMANINGTYAS, S.E.	198404282011012008	Pengelola Akuntansi Pada Sub Bidang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
61	IKA WULANDARI, S.E., M.Ak	198307272009022010	Analisis Keuangan Pada Sub Bidang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
62	SRI PARINI, S.E.	196911241993032007	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah Dan Inventarisasi Aset Daerah Pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
63	SUBHAH DWI HANDAYANI, S.E., M.M.	197807081999032003	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
64	SISWANTO, S.Kom.	197908182010011020	Pranata Komputer Muda Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata (III/c)
65	AGUS SUKAMTO, S.Kom	197504032010011013	Analisis Aset Negara Pada Sub Bidang Pendataan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Tk.I (III/d)
66	MARGIYANTO, S.E.	198104132006041008	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Pada Sub Bidang Pendataan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
67	ENNY SISWATININGSIH, A.Md.	198101062010012022	Penyusun Rencana Hasil Telahan Usul Penghapusan Barang Pada Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Penata Muda Tk.I (III/b)
68	WAHYU DWI NUGROHO	198103202010011014	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah Dan Inventarisasi Aset Daerah Pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah	PNS	Pengatur Tk.I (II/d)

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan - ----- x100% Jumlah APBD	(713.103.563.604 / 2.480.302.422.553) x 100% = 28,75 %
2		Rasio PAD	Jumlah PAD - ----- X 100% Jumlah APBD non migas	(453.827.906.415 / 2.519.378.722.414) x 100% = 18,01 %
3		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlahbelanjaurusanpemerintahan-transfer expenditures - ----- X 100% Jumlah belanja APBD	(1.616.606.734.644 / 2.480.302.422.553) x 100% = 65,18 %
		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	100% LKPD 2024 Kab. Karanganyar predikat WTP

2. Manajemen Keuangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari: $((\text{Realisasi belanja} / \text{Total belanja APBD}) - 1) \times 100\%$	$((2.482.302.422.553 / 2.388.635.550.478) - 1) \times 100\% = 3,84 \%$
2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari: $((\text{Total PAD dalam realisasi} / \text{Total PAD dalam APBD}) - 1) \times 100\%$	$((453.827.906.415 - 401.898.055.070) - 1) \times 100\% = 12,92 \%$
3		Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. ya ada 2. ya ada 3. ya ada 4. ya ada 100,00 %
4		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA $- \text{-----} \times 100\%$ Total belanja anggaran tahun sebelumnya	$(146.984.901.576 / 2.388.635.550.478) \times 100\% = 6,15$

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda - ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemerintah Daerah	(2.480.302.422.553 / 2.616.828.521.954) = 94,78 %
2		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda - ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 / 12 = 100 %

BAB IV
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkatdaerah	1) DukunganPelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 415.540.000,00 Realisasi: Rp. 392.541.200,00 Persentase: (94,47%)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10 Dokumen	10 (100%)		
			B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 176.523.300,00 Realisasi: Rp. 175.676.950,00 Persentase: (99,52%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 laporan	12 (100%)		
			C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 30.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 (100%)		

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi: Rp. 30.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan			
			D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 659.484.100,00 Realisasi: Rp. 633.238.038,00 Persentase: (96,02%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 383 unit	383 (100%)		
				2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 198.000.000,00 Realisasi: Rp. 196.211.000,00 Persentase: (99,10%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit	1 (100%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 98.125.000,00 Persentase: (98,13%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas 1 Unit	1 (100%)		
				4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 40.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas 10 Unit	10 (100%)		

			E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 137.761.700,00 Realisasi: Rp. 137.759.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21796 dokumen	21.796 (100%)		
			F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkatdaerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 37.893.750,00 Realisasi: Rp. 19.800.750,00 Persentase: (52,25%)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 68 orang	68 (100%)	Anggaran yang belum terserap adalah anggaran perjalanan dinas, dikarenakan untuk kegiatan tersebut menyesuaikan dari permintaan diklat dan pelatihan OPD terkait	
			G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 730.000.000,00 Realisasi: Rp. 628.700.000,00 Persentase: (86,12%)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 unit	2 (100%)		
			H. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 424.900.000,00 Realisasi: Rp. 418.634.000,00 Persentase: (98,53%)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket	24 (100%)		

			. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 31.227.475.817,00 Realisasi: Rp. 19.815.868.672,00 Persentase: (63,46%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 orang/bulan	68 (100%)	Anggaran yang belum terserap dikarenakan adasebagian anggaran dari Akres Gaji	
			J. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 37.508.277.500,00 Realisasi: Rp. 37.034.301.780,00 Persentase: (98,74%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan	12 (100%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 1.719.576.135,00 Realisasi: Rp. 1.530.595.950,00 Persentase: (89,01%)	JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	12 (100%)		
			K. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 427.224.000,00 Realisasi: Rp. 422.403.000,00 Persentase: (98,87%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 78 unit	78 (100%)		
			L. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 100.111.953,00 Realisasi: Rp. 99.638.540,00 Persentase: (99,53%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1	1 (100%)		

			Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan			
				2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 259.462.000,00 Realisasi: Rp. 259.461.920,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan	2 (100%)		
			M. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 773.746.000,00 Realisasi: Rp. 729.525.500,00 Persentase: (94,28%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 paket	10 (100%)		
				2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 1.224.820.000,00 Realisasi: Rp. 1.185.179.741,00 Persentase: (96,76%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 laporan	120 (100%)		
			N. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 173.321.100,00 Realisasi: Rp. 140.441.100,00 Persentase: (81,03%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 dokumen	8 (100%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KEUANGAN		a. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Anggaran: Rp. 357.395.000.700,00 Realisasi: Rp. 175.746.146.700,00 Persentase: (49,17%)	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan	12 (100%)		

			b. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Anggaran: Rp. 147.442.500,00 Realisasi: Rp. 143.723.500,00 Persentase: (97,48%)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5 Dokumen	5 (100%)		
			c. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) Anggaran: Rp. 724.112.000,00 Realisasi: Rp. 723.380.000,00 Persentase: (99,90%)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	12 (100%)		

					Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12			
			d. Programpengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Anggaran: Rp. 233.597.900,00 Realisasi: Rp. 229.231.250,00 Persentase: (98,13%)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3 Dokumen	3 (100%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Anggaran: Rp. 253.953.600,00 Realisasi: Rp. 250.019.200,00 Persentase: (98,45%)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3 Dokumen	3 (100%)		
				3) Koordinasidan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Anggaran: Rp. 102.959.000,00 Realisasi: Rp. 101.759.100,00 Persentase: (98,83%)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 4 dokumen	4 (100%)		

			e. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 679.519.250,00 Realisasi: Rp. 676.007.597,00 Persentase: (99,48%)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Dokumen	6 (100%)		
			f. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasidan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Anggaran: Rp. 6.584.000,00 Realisasi: Rp. 5.258.000,00 Persentase: (79,86%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 dokumen	12 (100%)		
				2) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Anggaran: Rp. 7.118.000,00 Realisasi: Rp. 5.985.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	12 (100%)		

				Persentase: (84,08%)	Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen			
				3) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Anggaran: Rp. 5.068.000,00 Realisasi: Rp. 4.250.000,00 Persentase: (83,86%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 4 Dokumen	4 (100%)		
			g. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Anggaran: Rp. 19.811.450,00 Realisasi: Rp. 18.181.850,00 Persentase: (91,77%)	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen	42 (100%)		
				2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Anggaran: Rp. 18.917.600,00 Realisasi: Rp. 18.841.600,00 Persentase: (99,60%)	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 42 Dokumen	42 (100%)		
			h. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Anggaran: Rp. 8.669.000,00	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	1 (100%)		

			Pelaporan Keuangan Daerah	Realisasi: Rp. 8.669.000,00 Persentase: (100,00%)	Semesteran 1 dokumen			
			i. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Anggaran: Rp. 514.972.125,00 Realisasi: Rp. 507.858.430,00 Persentase: (98,62%)	Jumlah DokumenHasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 4 Dokumen	4 (100%)		
				2) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Anggaran: Rp. 78.864.600,00 Realisasi: Rp. 78.534.600,00 Persentase: (99,58%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2 Dokumen	2 (100%)		
			j. Program pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barangmilik Daerah	1) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Anggaran: Rp. 398.840.950,00 Realisasi: Rp. 378.508.247,00 Persentase: (94,90%)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 dokumen	12 (100%)		
			k. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 554.017.900,00 Realisasi: Rp. 550.872.900,00 Persentase: (99,43%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 (100%)		

					90 orang			
			l. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 283.747.000,00 Realisasi: Rp. 277.831.800,00 Persentase: (97,92%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 orang	100 (100%)		
			m. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 375.550.604,00 Realisasi: Rp. 368.470.500,00 Persentase: (98,11%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 90 orang	90 (100%)		
			n. Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Penagihan Pajak Daerah Anggaran: Rp. 1.707.749.552,00 Realisasi: Rp. 1.549.194.694,00 Persentase: (90,72%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 50.400 dokumen	50.400 (100%)		
			o. Program pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Anggaran: Rp. 153.944.530,00 Realisasi: Rp. 151.214.400,00 Persentase: (98,23%)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 laporan	2 (100%)		
			p. Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	1) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Anggaran: Rp. 83.667.875,00 Realisasi: Rp. 82.626.875,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 108 Dokumen	108 (100%)		

			Daerah	Persentase: (98,76%)				
				2) PenetapanWajibPajakDaerah Anggaran: Rp. 1.495.174.700,00 Realisasi: Rp. 1.453.308.400,00 Persentase: (97,20%)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitiandan Verifikasi 504000 dokumen	504.000 (100%)		
			q. Program pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1) Pengamanan Barang Milik Daerah Anggaran: Rp. 306.189.050,00 Realisasi: Rp. 289.554.150,00 Persentase: (94,57%)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 12 laporan	12 (100%)		
				2) Pengawasan danPengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggaran: Rp. 490.959.456,00 Realisasi: Rp. 453.881.139,00 Persentase: (92,45%)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 12 laporan	12 (100%)		
			r. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 22.785.826.900,00 Realisasi: Rp. 22.785.826.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 12 Laporan	12 (100%)		
				2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Anggaran: Rp. 13.109.267.094,00 Realisasi: Rp. 2.187.166.092,00 Persentase: (16,68%)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 laporan	12 (100%)	Adanya alokasi SILPA mengikat sebesar Rp. 7.026.123.694 Dikarenakan belum ada juknis penggunaannya	

							sehingga ditampung di BTT dan apabila sudah terbit juknisnya maka akan direalisasikan dengan mekanisme penggunaan BTT. Alokasi anggaran selebihnya untuk antisipasi keadaan darurat termasuk adanya informasi bencana Megatrast/ bencana lainnya (alokasi belanja kedaruratan sebagai antisipasi) dan keadaan mendesak untuk kekurangan kegiatan mandatoris spending yang belum ada alokasi penganggarnya.	
			s. Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Pengendalian, Pemeriksaan danPengawasan Pajak Daerah Anggaran: Rp. 324.017.600,00 Realisasi: Rp. 276.701.400,00 Persentase: (85,40%)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 504000 Dokumen	504.000 (100%)		
				2) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Anggaran: Rp. 1.777.183.300,00 Realisasi:	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 450000obyek pajak	450.000 (100%)		

				Rp. 1.740.232.380,00 Persentase: (97,92%)				
				3) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Anggaran: Rp. 10.734.150,00 Realisasi: Rp. 7.635.450,00 Persentase: (71,13%)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 50 Dokumen	50 (100%)		
			t. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Anggaran: Rp. 95.205.800,00 Realisasi: Rp. 84.605.550,00 Persentase: (88,87%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 84 dokumen	84 (100%)		
			u. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran: Rp. 6.433.500,00 Realisasi: Rp. 6.433.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD 1 Dokumen	1 (100%)		
				2) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 5.125.069,00 Realisasi: Rp. 5.125.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen	1 (100%)		

			v. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Anggaran: Rp. 19.589.000,00 Realisasi: Rp. 18.206.000,00 Persentase: (92,94%)	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen	1 (100%)		
			w. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 3.850.000,00 Realisasi: Rp. 3.850.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen	1 (100%)		
			x. Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Anggaran: Rp. 244.949.830,00 Realisasi: Rp. 238.872.650,00 Persentase: (97,52%)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah2 dokumen	2 (100%)		
			y. Program pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Anggaran: Rp. 129.881.530,00 Realisasi: Rp. 100.066.150,00 Persentase: (77,04%)	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah 336 dokumen	336 (100%)		

			z. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Anggaran: Rp. 66.284.400,00 Realisasi: Rp. 66.238.400,00 Persentase: (99,93%)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 22 dokumen	22 (100%)		
			a. Program pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Anggaran: Rp. 160.000.000,00 Realisasi: Rp. 159.600.000,00 Persentase: (99,75%)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen	12 (100%)		

G. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Kementerian/LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Kementerian/LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

No	Kementerian/LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

1.Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima Indikator	Target	Batas	Mutu Minimal Indikator	Target	Batas	Keterangan
Nihil								

2.Indeks Pencapaian (IP) SP

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima Indikator	Target	Batas	Mutu Minimal Indikator	Target	Batas	Keterangan
Nihil								

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
	Nihil	

B. Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	JUARA 1 Penilaian Ketersediaan Informasi Publik pada Website Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar	Pj. BUPATI KARANGANYAR
2.	Kearsipan Perangkat Daerah	BUPATI KARANGANYAR

BAB VIII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan Daerah.

Dari penjabaran laporan Pelaksanaan Tugas Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 jumlah Alokasi Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Adalah :
 - Anggaran Belanja : Rp. 101.239.750.070,00
 - Realisasi : Rp. 77.209.997.445,00 _
 - Sisa Anggaran : Rp. 24.029.752.625,00

Atau dapat disimpulkan persentase capaian kinerja keuangan adalah:

$$\frac{101.239.750.070}{77.209.997.445} \times 100\% = \mathbf{76.3 \, \%}$$

- 2. Capaian Pendapatan dari sektor Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
 - Target : Rp. 217.700.930.000,00
 - Realisasi : Rp. 245.820.209.492,00

Atau dapat disimpulkan persentase capaian Pendapatan dari sektor Pajak Daerah

$$\frac{217.700.930.000}{245.820.209.492} \times 100\% = \mathbf{111.8 \, \%}$$

B. SARAN

Laporan Pelaksanaan Tugas atas penyelenggaraan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 ini adalah merupakan cerminan kinerja dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2024, oleh karena itu Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kiranya perlu dievaluasi secara komprehensif, sehingga pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar akan tepat

sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700510 199003 1 006